

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan antara lain:

Pertama, peran kiai pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dalam dinamika politik ada beberapa bentuk, yakni sebagai aktor dan sebagai pendukung atau partisipan. Sebagai aktor, kiai terlibat secara langsung sebagai praktisi dan aktor politik yang terjun sebagai pengurus dan aktivis partai politik sekaligus menjadi anggota tim sukses parpol tertentu dan juru kampanyenya.

Sedangkan sebagai pendukung dan partisipan, kiai memberikan legitimasi politik yang sering dimanifestasikan dalam bentuk restu politik pada partai atau tokoh politik tertentu yang berasal dari lingkungan maupun luar pesantren sekaligus sebagai kekuatan pendukung calon tertentu dengan cara memberikan dukungan dalam bentuk mengkampanyekan calon yang didukungnya untuk mensosialisasikan visi politik calon tersebut.

Kedua, motivasi dan orientasi bergabungnya kiai pesantren ke dalam politik praktis didasari oleh landasan teologis, ideologis dan solutif. Landasan teologis adalah kiai memandang bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Dalam landasan teologis ini kiai memandang bahwa pemimpin dalam agama Islam adalah sebuah keniscayaan yang harus ada dalam sebuah negara, sehingga keterlibatan kiai dalam politik adalah untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam proses memilih pemimpin yang baik, adil dan bijaksana.

Landasan ideologis adalah terjunnya kiai ke gelanggang politik merupakan panggilan hati untuk mengawal proses demokrasi agar tercipta masyarakat yang aman, tentram, adil dan makmur. Atau dengan bahasa agama, masuknya kiai ke ranah politik sebagai bagian *amar ma'ruf nahī munkar*. Sedangkan landasan solutif adalah adanya pengakuan masyarakat bahwa kiai pewaris para nabi memberikan legitimasi bahwa kiai adalah sosok yang paling menentukan dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang dihadapi umat.

Ketiga, dampak dari peran politik pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata terhadap perkembangan pondok pesantren yang dipimpinnya adalah demokratisasi warga pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dalam bentuk pengambilan keputusan politik masih terpatron kepada kiai, hal ini terjadi karena para santri masih mengikuti budaya *takzim* kepada kiai. Selain permasalahan pilihan politik, pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata menganut sistem demokrasi terpimpin, dimana segala sesuatunya pada akhirnya berada pada keputusan kiai.

Dalam hal kompensasi ekonomi dan politik pragmatis, pesantren tidak turut mengukuhkan politik pragmatis karena pesantren tidak menjadikan politik sebagai ajang untuk mempertukarkan dukungan politik dengan kompensasi-kompensasi materi yang diterima.

Keterlibatan pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dan kiai K.H. Hamid sebagai pengasuhnya dalam politik secara nyata tidak mendeligitimasi peran pesantren sebagai otoritas moral dan referensi keagamaan. Pesantren tidak mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas santri karena K.H. Hamid sebagai pimpinan pesantren tidak meninggalkan pesantren secara totalitas.

K.H. Hamid tetap menjalankan tugasnya di pesantren, hanya disela-sela kegiatannya di pesantren, K.H. Hamid memperjuangkan agama Islam melalui jalur politik. Sehingga aktivitas beliau dalam politik tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan pesantren.

Perkembangan santri dari segi kuantitas di pesantren Mambul Ulum Bata-Bata tidak disebabkan adanya tendensi politik yaitu keterlibatan para pengasuh pesantren dalam politik, melainkan karena program-program pendidikan yang ditawarkan oleh pesantren diterima oleh masyarakat.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren untuk *out-put* santri yang berkualitas, para pengasuh dan pengelola lembaga yang berada dibawah naungan pesantren disamping meningkatkan kualitas guru atau ustad, juga meningkatkan potensi kursus di asrama untuk mengejar ketertinggalan santri/siswa di kelas. Misalnya, diterapkannya program-program akselerasi pembelajaran yang dilakukan di luar jam sekolah pendidikan formal.

Perbedaan pilihan politik antara kiai dan santrinya menyebabkan sikap santri terhadap kiaiinya tidak sepatasnya dilakukan oleh santri, akan tetapi sikap negatif ini tidak sampai pada yang bersifat prinsipil. Namun demikian, perbedaan pilihan politik kiai dan santrinya ini juga menyebabkan beberapa santri yang meninggalkan pesantren. Perbedaan pilihan politik ini bukan hanya melibatkan antara kiai dan santrinya, akan tetapi antara kiai dengan alumni pesantren dan antar alumni pesantren yang menyebabkan adanya faksi-faksi antar alumni pesantren dan alumni dengan kiaiinya.

Terjadi resistensi masyarakat atas sikap politik pesantren. Hal tersebut secara nyata dapat disaksikan dalam sikap politik masyarakat yang seakan-

akan membangkang terhadap pilihan politik pesantren. Seiring demokratisasi dan perkembangan pendidikan, masyarakat semakin bisa membedakan antara sikap pesantren sebagai sikap keagamaan yang patut dicontoh, ditaati, dan diteladani serta sikap pesantren yang sebetulnya murni politik kepentingan yang tidak berkaitan dengan ajaran keagamaan sehingga tidak harus ditaati. Kondisi itu membuat masyarakat memandang pesantren tidak lagi objektif dalam sikap-sikap politiknya, karena cenderung menguntungkan kelompok politik tertentu sehingga terjadi delegitimasi peran pesantren.

Resistensi mengakibatkan terjadinya *image* negatif masyarakat terhadap pesantren. Hal ini sangat tidak baik terhadap perkembangan pesantren kedepan. Kiai sebagai figur sentral dipesantren sudah ternodai oleh ketidakpercayaan sebagian masyarakat, kalau misalnya hal ini terus dibiarkan, maka ketokohan kiai akan memudar dan bahkan bisa hilang dan mendeligitimasi peran pesantren sebagai otoritas moral dan referensi keagamaan.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, mengkonstruksi ulang peran dan keterlibatan kiai dalam ranah politik. Keterlibatan kiai dalam konflik dalam politik menjadi faktor penyebab tergerusnya citra kiai dan *image* yang negatif bagi pesantren di mata masyarakat. Dalam konteks ini ada dua pilihan, yang pertama, kiai sama sekali tidak memasuki wilayah politik praktis. Kedua, tetap masuk dalam arus politik praktis namun catatan harus dilihat, dipandang dan diperlakukan sebagaimana layaknya politisi. Dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, memandang

kiai yang terjun ke kancah politik sebagai aktor politisi akan membantu melepaskan beban sosial yang harus ditanggung kiai tersebut.

Kedua, upaya membangun pendidikan pesantren ke arah sistem dan kultur sebagai pendidikan pesantren serta rasional justru membuahkan adanya santri yang meninggalkan pesantren dan *image* negatif dari masyarakat yang disebabkan oleh peran kiai dalam dunia politik. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal serupa terjadi di masa depan maka pengasuh haruslah senantiasa melihat dampak terhadap pesantren yang akan ditimbulkan dari berperannya pengasuh ke gelangang politik praktis. Sehingga pesantren akan berkembang lebih baik.

Ketiga, beranjak dari adanya faksi-faksi alumni pesantren yang disebabkan oleh perbedaan pilihan politik dengan kiainya, maka perlu dilakukan rekonstruksi pola komunikasi dan relasi antara kiai dengan alumni. Hubungan sejarah diantara keduanya tidak dapat dihapus. Hanya saja, perlu dilakukan komunikasi yang intensif dan kontinu sehingga tercipta satu pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing dalam kehidupan politik dan sosial kemasyarakatan. Jika hal itu dilakukan maka perbedaan-perbedaan politik terutama dalam aspek pragmatisme politik seperti pencalonan dalam Pilkada dan sebagainya tidak akan terjadi.

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Desa Pana'an Kecamatan palengaan Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini tidak secara mutlak dapat dijadikan sebagai acuan dalam melihat pola dampak dari peran politik kiai terhadap pendidikan pesantren secara luas. Dengan demikian, penulis memberikan saran bagi seluruh

pemerhati, akademisi, dan para peneliti yang tertarik tentang dampak peran politik kiai terhadap pendidikan pesantren untuk senantiasa melakukan penelitian lebih lanjut, terutama penelitian yang berlatar belakang politik kiai dan pendidikan pesantren, agar lebih menambah wawasan dan khazanah tentang perkembangan pendidikan pesantren.

C. Keterbatasan Penelitian

Tidak ada suatu penelitian yang tidak punya keterbatasan dan kelemahan. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa penelitian ini hanya dilakukan di pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Desa Pana'an Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan dan itupun hanya terpusat pada persoalan dampak politik kiai terhadap perkembangan pesantren, bisa saja dengan fenomena dan kasus yang sama, fenomena ini menjadi gambaran yang serupa pada kondisi dan tempat yang berbeda, tetapi pada fenomena dan kasus yang berbeda akan memberikan arti fenomena dan kondisi yang berbeda pula. Hal ini disebabkan bahwa hakikat penelitian adalah memberikan secercah informasi sebagai sebuah kebenaran karena ruh dari ilmu pengetahuan adalah tidak mutlak.

Dengan beragam ilmu yang dimiliki, kemudian berkembang dan dapat ditemukan informasi yang baru sebagai pelengkap khazanah ilmu pengetahuan yang ada. Hal itu antara lain dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian baru dengan kondisi, fenomena, dan topik-topik riset yang beragam. Sebagai kata penutup, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak memuat kebenaran yang mutlak namun justru membuka kemungkinan untuk penambahan informasi, data dan fakta atau bahkan direvisi sepenuhnya sehingga menjadi sempurna.